



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
KOMISI VI DPR RI
KE KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT
TANGGAL 3 S.D 5 SEPTEMBER 2021**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

2021



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VI DPR-RI
KE PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
KOTA BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PADA MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2021-2022
TANGGAL 3 S.D. 5 SEPTEMBER 2021**

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Kunjungan Kerja

Undang-Undang No. 13/2019 dan pasal 60 peraturan DPR nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib mengatur bahwa komisi dalam melaksanakan tugas dibidang pengawasan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat dapat melakukan kunjungan kerja dalam masa sidang.

Keputusan Rapat Intern Komisi VI DPR RI mengenai Sasaran dan Obyek Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI di dalam Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021 – 2022.

B. Objek Kunjungan Kerja.

Objek kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI adalah PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) di zona regional Provinsi Jawa Barat.

C. Maksud dan Tujuan Kunjungan Kerja

Secara umum maksud dan tujuan kunjungan kerja ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang realisasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dan rencana strategi yang akan dilakukan, terutama yang berkaitan dengan bidang tugas serta lingkup Komisi VI DPR RI, yaitu Perdagangan, Koperasi/Usaha Kecil dan Menengah (UKM), BUMN, Investasi, dan Persaingan Usaha.



Secara khusus, kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan permasalahan yang dihadapi oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), terkait pengawasan terhadap pelaksanaan proyek PLN penerima PMN 2020 di wilayah Jakarta-Jawa Barat oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) di regional Provinsi Jawa Barat.

D. Agenda Kunjungan Kerja

Kunker Panja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Provinsi Jawa Barat ini dilaksanakan dengan agenda pertemuan ke PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

E. Anggota Tim Kunjungan Kerja

Anggota Tim dalam pelaksanaan kegiatan Kunker Spesifik Komisi VI DPR RI ke Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

NO.	NO.	N A M A	KETERANGAN	FOTO
1	A-327	GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP.	KETUA TIM/WAKIL KETUA KOMISI VI/ F.PG	
2	A-352	MARTIN Y MANURUNG, S.E., M.A.	WAKIL KETUA KOMISI VI/ F.P.NASDEM	

3	A-196	ADISATRYA SURYO SULISTO	F.PDIP	
4	A-161	DARMADI DURIANTO	F.PDIP	
5	A-209	SONNY T. DANAPARAMITA, S.H	F.PDIP	
6	A-251	Ir. DEDDY YEVRİ HANTERU SITORUS, M.A.	F.PDIP	
7	A-305	H. SINGGIH JANURATMOKO, S.K.H., M.M.	F.PG	
8	A-302	NUSRON WAHID	F.PG	
9	A-335	Drs. H. BAMBANG HERI PURNAMA, S.T., S.H., M.H.	F.PG	
10	A-65	ANDRE ROSIADE	F.P.GERINDRA	
11	A-128	DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.	F.P. GERINDRA	
12	A-131	Ir. H. LA TINRO LA TUNRUNG	F.P. GERINDRA	
13	A-396	MUHAMMAD RAPSEL ALI	F.NASDEM	

14	A-19	MARWAN JA'FAR	F.PKB	
15	A-563	PUTU SUPADMA RUDANA, MBA	F.PD	
16	A-536	HJ. MELANI LEIMENA SUHARLI	F.PD	
17	A-500	DAENG MUHAMMAD, SE, M.Si	F.PAN	
18	A-472	H. ACH. BAIDOWI, S.Sos., M.Si	F.PPP	

F. HASIL KUNJUNGAN

Hasil Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

PLN Jawa Barat saat ini melayani hampir 15 Juta Pelanggan dengan penambahan sebanyak 357 Ribu pelanggan selama tahun 2020 sehingga Rasio Elektrifikasi menjadi 99.5% . Namun demikian, saat ini masih terdapat 204.608 KK yang belum berlistrik.

Pada tahun 2019 telah tercapai 1.032 kWh/Kapita yang pencapaiannya lebih tinggi dari konsumsi listrik per kapita secara Nasional, PLN Jawa Barat telah berhasil mencatatkan pertumbuhan konsumsi energi listrik sebesar 3% sampai triwulan I 2020, akan tetapi akibat terjadinya Pandemi COVID19, telah terjadi penurunan konsumsi energi listrik sebesar -1.9% pada triwulan II dan III. Penurunan konsumsi energi listrik terbesar terjadi di kelompok pelanggan industri -11.7% dan di kelompok pelanggan bisnis sebesar -4.4%, sedangkan di kelompok pelanggan Rumah Tangga justru mengalami peningkatan yang

signifikan sebesar 10.9%. Namun demikian, di dua bulan terakhir telah terlihat tren yang semakin membaik di seluruh kelompok pelanggan.

Sebagai bentuk dukungan terhadap penggunaan Green Energy yang ramah lingkungan, PLN terus berupaya mengembangkan pembangkit EBT di Jawa Barat. Sampai dengan saat ini, jumlah pembangkit energi baru terbarukan di wilayah kerja PLN Jawa Barat memiliki Bauran Energi sebesar 47% dari total pembangkit beroperasi, yang terdiri dari PLTA, PLTSa, PLTS dan PLTP, dan masih terdapat potensi lain yaitu PLTSa Legok Nangka dengan kapasitas 19 MW dan PLTSa Cikelor dengan kapasitas 5 MW. Selain itu, ada juga potensi PLTB di Ciemas Pelabuhan Ratu Sukabumi dengan kapasitas 150 MW.

I. Realisasi PMN Tahun Anggaran 2020 Jakarta-Jawa Barat

Realisasi PMN Tahun Anggaran 2020 Jakarta-Jawa Barat dari total pagu PMN 2020 di Jawa-Bali sebesar Rp 2,44 T di alokasikan untuk pekerjaan di DKI Jakarta dan Jawa Barat sebesar Rp 1,76 T dimana saat ini sudah terserap sebesar Rp 1,73 T atau 98%. PMN 2020 di DKI Jakarta dan Jawa Barat berperan untuk memenuhi kebutuhan kontrak sebesar 22% dari total nilai kontrak. Saat ini terdapat 35 proyek dengan progres: 16 proyek progress fisik 100%, 19 proyek tahap konstruksi (7 proyek ditargetkan selesai 2021 dan 12 proyek ditargetkan selesai 2022). Dengan kendala yang dihadapi adalah Pembebasan Lahan jalur transmisi, Pemanfaatan dan perizinan lahan aset BMN, Jadwal pemadaman jalur eksisting, dan performa kontraktor.

II. Sinergi PT PLN (Persero) dan Pembangunan PLTS

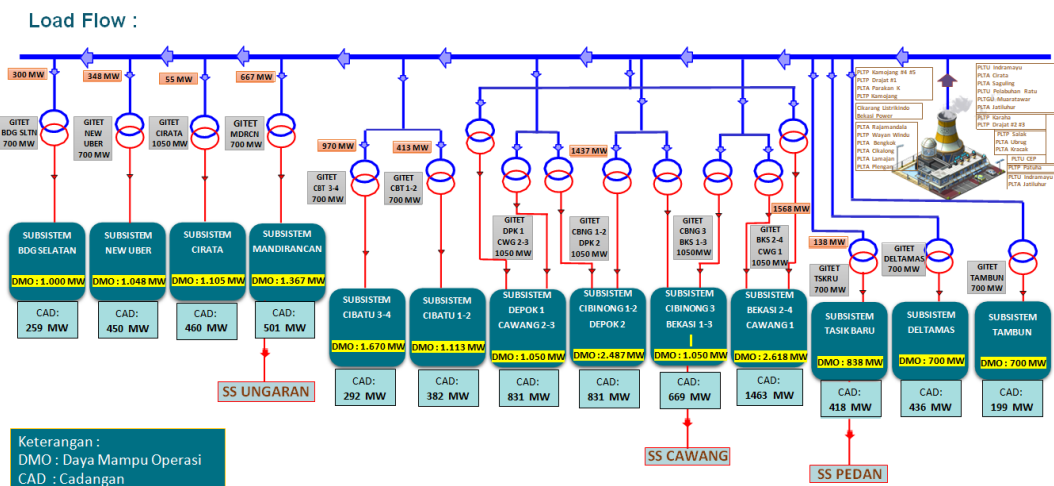
- Sinergi PT PLN (Persero)
 - a. Sinergi PLN dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui penerbitan Penetapan Lokasi yang berguna untuk PLN dalam penyediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.
 - b. Sinergi PLN dengan Kementerian ESDM, DJK, KPPIP, Kemenko

Perekonomian, Kemenko Marves dalam bentuk fasilitasi penyelesaian permasalahan project.

- c. Sinergi pemanfaatan tanah BMN untuk pembangunan dan lintasan infrastruktur ketenagalistrikan dengan kementerian PUPR (Badan Usaha Jalan Tol). Kendala yang dihadapi adalah adanya dispute penerapan regulasi di lapangan, dimana dalam proses pemanfaatan lahan aset BMN, PLN mengacupada PP no 25 tahun 2021, PMK nomor 115 tahun 2020 dan Permen ESDM nomor 13 tahun 2021 dimana sesuai ketentuan yang berlaku PLN hanya dikenakan biaya sewa BMN yang dibayarkan kepada negara (Penerimaan Negara Bukan Pajak) namun pada pelaksanaannya PLN dikenakan tarif sewa karena pihak Badan Usaha Jalan Tol memiliki peraturan internal yang menjadi dasar pengenaan biaya. Hal ini menjadi kendala dalam proses perizinan sehingga menghambat proses pembangunan.
- Pembangunan PLTS
1. Saat ini tidak ada proyek PLTS yang dibiayai oleh PMN 2020 di Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta
 2. Adapun Status PLTS sampai dengan Juli 2021 sebagai berikut:
 - a) Kapasitas terpasang PLTS mencapai 79,87 MW dengan porsi PLTS milik PLN sebesar 18,62 MW atau sebesar 23,3%.
 - b) Terdapat 8 pembangkit PLTS milik PLN dengan total 1,93 MWp yang sudah beroperasi yaitu PLTS Ternate & Ternate Selatan 280 kWp, PLTS Pasir Putih 530 kWp, PLTS Seraya Meranu 190 kWp, PLTS Tribur 250 kWp, PLTS Batu Tiga 120 kWp, PLTS Usulanu 70 kWp, PLTS Nuca Molas 380 kWp dan PLTS Treweng 110 kWp.
 - c) Terdapat 4 pembangkit PLTS milik PLN dengan total 2.290 kWp yang masih tahap konstruksi dalam yaitu PLTS Parumaan 420 kWp, PLTS Papagarang 380 kWp, PLTS Kojadoi 190 kWp, PLTS Selayar 1,3 MWp.

III. Pasokan Listrik PLN

Saat ini, pasokan energi listrik di Jawa Barat dalam kondisi yang sangat cukup dengan Daya Mampu 12.083 MW dengan Beban Puncak 7.475 MW atau terdapat Cadangan Daya sebesar 38%. Cadangan daya tersebut siap untuk melayani Potensi pelanggan dengan daya besar sebanyak 45 pelanggan dengan total daya sebesar 166 MVA. Diantaranya adalah pembangunan KCJB, Pelabuhan Patimban, Pengembangan Kawasan Aero City, dan Kawasan Industri Subang. Dalam mendukung Program Pantura Juara, Jawa Barat Sebagai Lumbung Padi Nasional, PLN siap mendukung *Electrifying Agriculture* di kawasan tersebut melalui Program Dedieselisasi atau pengalihan dari energi yang dibangkitkan oleh diesel ke energi listrik PLN pada Penggilingan Padi, Tambak Udang, Pompa Irigasi, Industri pengolahan hasil pertanian, dan lainnya.



Gambar 1. Cadangan Daya Listrik Jawa Barat

IV. Manfaat yang diterima oleh Masyarakat di wilayah Jakarta-Jawa Barat

a. Bagi Pemerintah :

1. Pemerataan akses ketersediaan listrik bagi rakyat (program peningkatan rasio elektrifikasi).
2. Pelayanan penyediaan listrik melalui kualitas distribusi listrik untuk dapat meningkatkan aktivitas produksi, perdagangan, dan kegiatan masyarakat.
3. Menciptakan multiplier effect melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja, peningkatan pembayaran pajak, peningkatan ekonomi sektor riil, sehingga dapat menjadi daya dorong pertumbuhan perekonomian daerah/nasional.
4. Perwujudan dukungan Pemerintah kepada PT PLN (Persero) dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden No.14 tahun 2017.

b. Bagi Masyarakat :

1. Meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2. Meningkatkan ekonomi yang berkeadilan.
3. Mendukung pelayanan kesehatan, pendidikan, pariwisata dan transportasi.
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia sehubungan peningkatan aktivitas produksi, perdagangan maupun kegiatan masyarakat lainnya.

c. Bagi Perusahaan :

1. Alokasi PMN tahun 2020 Regional JMB sebesar Rp 2.4 Triliun akan mengurangi pendanaan yang harus disediakan (*gap funding*) dan secara berkelanjutan memperbaiki DER tahun-tahun selanjutnya.
2. Meningkatkan kemampuan pendanaan bagi PT PLN (Persero) untuk mendanai pembiayaan infrastruktur ketenagalistrikan.

3. Penambahan PMN diperlukan sebagai bentuk dukungan pemerintah kepada PT PLN (Persero) dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden No.14 tahun 2017.

V. Rasio Dusun PLN dan Realisasi Pembangunan Infrastuktur Listrik Desa di Jawa Barat

PT PLN (Persero) mengklaim rasio Dusun belistrikan 100% di kondisi tahun 2021 dengan total desa di Jawa Barat sebanyak 5957 desa dengan progress pembangunan listrik desa sampai dengan bulan agustus 2021 menyala di 181 dusun. PLN memang menargetkan rasio dusun belistrikan seluruh Indonesia bisa mencapai 100 persen pada 2023, di Tahun 2020 tidak ada anggaran PMN, di 2021 dengan Anggaran 26,58 Miliar, 2022 dengan anggaran 25,15 Miliar dan Anggaran 2023 sebanyak 45 Miliar.



Gambar 2. Roadmap Rasio Dusun Belistrikan 100% dari PLN di Jawa Barat

Penyediaan akses listrik bagi desa merupakan suatu program yang strategis untuk menutup kesenjangan antar desa dan kota, maupun kesenjangan antar wilayah. Melalui penyediaan akses listrik desa, pembangunan ekonomi masyarakat dapat ditingkatkan dan diharapkan dapat mengikis kemiskinan. Penyediaan akses listrik perdesaan juga dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap hak rakyat atas energi yang berkualitas dan terjangkau. Penyediaan listrik perdesaan di Indonesia menghadapi berbagai kendala teknis, ekonomi dan sosial akibat kondisi geografi, topografi dan penyebaran penduduk yang tidak

merata. Tantangan lainnya adalah keekonomian atas infrastruktur untuk menyediakan akses listrik perdesaaan yang tinggi. Diperlukan berbagai upaya teknis dan ekonomis untuk mengatasi berbagai tantangan seperti keadaan geografis (pegunungan, lembah dll), penebangan,./pemangkasan pohon, transportasi manual (kesulitan akses kendaraan).

Terlihat gambar dibawah ini realisasi di Tahun 2021 target pembangunan lides sebanyak 360 dusun/kampung dengan nilai Rp26.581.505.817 sampai bulan agustus 2021 sudah terealisasi sebanyak 181 dusun dengan nilai Rp19.880.510.226 dari sumber anggaran PMN Tahun Anggaran 2021.

	TAHUN	JTM	GARDU		JTR	DSN/KAMPUNG	NILAI	SUMBER ANGGARAN
			100KVA	50KVA				
Rencana	2021	71,08	21	42	203,29	360	Rp 26.581.505.817	PMN
Realisasi		29,837	5	10	92,263	181	Rp 19.880.510.226	

PROGRES REALISASI PEMBANGUNAN LISDES S/D AGUSTUS 2021

NO	KABUPATEN	JUMLAH DUSUN		JTM (kms)		JTR (kms)		JUMLAH GARDU		GARDU (kVA)		POTENSI PELANGGAN	
		MENYALA	BLM MENYALA	MENYALA	BLM MENYALA	MENYALA	BLM MENYALA	MENYALA	BLM MENYALA	MENYALA	BLM MENYALA	MENYALA	BLM MENYALA
1	Cianjur	45	40	16,660	20,540	28,305	37,179	3	20	150	1.100	675	645
2	Bandung Barat	4	0	-	-	1,593	0,003	-	-	-	-	60	-
3	Bogor	1	1	0,005	-	1,601	-	1	-	100	-	15	35
4	Bandung	2	3	2,150	6,150	-	7,240	-	5	-	350	30	122
5	Cirebon	1	4	1,473	1,047	1,543	1,697	2	4	200	400	15	60
6	Tasikmalaya	50	21	2,130	2,130	18,897	3,478	3	7	200	450	750	315
7	Garut	47	26	0,860	0,060	19,195	11,742	2	1	100	50	705	390
8	Sukabumi	10	81	6,488	4,972	15,805	47,039	3	9	150	550	150	1.174
9	Karawang	1	0	0,071	-	0,404	0,404	1	-	100	-	15	-
10	Indramayu	20	0	-	-	4,920	-	-	-	-	-	300	-
11	Gunung Putri	0	2	-	1,080	-	1,923	-	1	-	100	-	30
12	Sumedang	0	1	-	7,456	-	0,326	-	1	-	100	-	35
TOTAL		181	179	29,837	41,245	92,263	111,031	15	48	1.000	3.100	2.715	2.806
		360		71,082		203,294		63		4.100		5.521	

Kendala yang dihadapi : Kondisi geografis (pegunungan, lembah dll), Penebangan/pemangkasan pohon, Transportasi manual (kesulitan akses kendaraan)

Gambar 3. Realisasi Pembangunan Infrastuktur Listrik Desa

G. REKOMENDASI

Dari pertemuan yang dilakukan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), pada saat pelaksanaan kunjungan kerja spesifik, ada beberapa rekomendasi antara lain adalah sebagai berikut:

1. Komisi VI DPR RI merekomendasikan kepada PT PLN (Persero) terkait pemanfaatan energi baru terbarukan agar dipersiapkan dengan sebaik-baiknya dari *roadmapnya* dan *blueprint* kebijakan untuk siap dengan kondisi zaman dari perubahan teknologi dimasa depan.
2. Komisi VI DPR RI merekomendasikan kepada PT PLN (Persero) terkait untuk mencari cara alternatif agar pemanfaat energi baru terbarukan di Jakarta-Jawa Barat bisa digunakan merata dan maksimal sehingga tidak ada lagi ada permasalahan seperti dari harganya yang tinggi.
3. Komisi VI DPR RI merekomendasikan kepada PT PLN (Persero) untuk penggunaan diesel mencukupi kebutuhan listrik masih banyak dipakai di luar Jawa – Bali, diharapkan 1 atau 2 tahun kedepan dapat menekannya dengan subsidi.
4. Komisi VI DPR RI merekomendasikan kepada PT PLN (Persero) untuk pencadangan listrik harus seimbang agar tidak terjadi dua sisi yang merugikan .
5. Komisi VI DPR RI merekomendasikan kepada PT PLN (Persero) penerima PMN Tahun Anggaran 2021 untuk merealisasikan Program listrik desa dan program terkait secara keseluruhan khususnya di Jakarta-Jawa Barat dan memberikan kualitas yang terbaik.
6. Komisi VI DPR RI merekomendasikan kepada PT PLN (Persero) untuk bersinergi dengan pelaku UMKM khususnya yang ada di Jakarta-Jawa Barat.
7. Komisi VI DPR RI merekomendasikan kepada PT PLN (Persero) untuk memprioritaskan program lisdas kedaerah terpencil agar adanya kemajuan ekonomi yang merata.
8. Komisi VI DPR RI merekomendasikan kepada PT PLN (Persero) untuk tidak kalah bersaing dengan pelayanan dan kualitas yang diberikan dari pihak swasta.

9. Komisi VI DPR RI merekomendasikan kepada PT PLN (Persero) untuk Kinerjanya tidak kalah saing dari Telkom yang sudah bisa menyentuh daerah pedalaman paling dalam.
10. Komisi VI DPR RI merekomendasikan kepada PT PLN (Persero) untuk lebih memperhatikan peluang baru yang ada seperti kompor induksi yang lebih merakyat daripada kompor gas.
11. Komisi VI DPR RI merekomendasikan kepada PT PLN (Persero) untuk bersinergi dengan PT Pertamina (Persero) terkait industri mobil listrik dengan subsidi yang terkait.

**KETUA TIM KUNKER SPESIFIK KOMISI VI DPR RI
KE PROVINSI JAWA BARAT**

TTD.

GDE SUMARJAYA LINGGIH, SE., M.A.P.
A – 327

H. DOKUMENTASI KEGIATAN

